

2023



Departemen Sains
Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat

Policy Brief

Komunikasi Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat,
Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TANI DALAM MENGANTISIPASI KERAWANAN PANGAN DI NUSA TENGGARA

Ir. Murdianto, M.S

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB

Email : murdianto@apps.ipb.ac.id

Tanggal Publish : 30 Juni 2023

Isu Kunci

- Masalah ketahanan pangan di wilayah jumlah penduduk miskin
- Bencana Hidrologis baik karena perubahan iklim menyebabkan turunnya daya dukung (*carrying capacity*) alam
- Sosialisasi dan pemberdayaan terkait diversifikasi produksi dan konsumsi pangan lokal

Ringkasan

Kerawanan pangan tidak terjadi secara mendadak. Proses tersebut diawali dengan rasa khawatir karena tidak memiliki cukup makanan, jika keadaan tidak berubah akan diikuti perubahan pola makan karena sumber makanan terbatas, dan akhirnya penurunan konsumsi makanan di rumah tangga. Penyebab kerawanan pangan (wilayah maupun rumah tangga): (a) ketimpangan PDRB antarwilayah/provinsi, (b) ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana, (c) geografi wilayah (kepulauan), (d) besaran dan ketimpangan pendapatan rumah tangga, (e) kenaikan harga pangan dan non-pangan. Namun demikian pemicu kerawanan pangan dapat berupa faktor alam dan Tindakan manusia salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim, yang menyebabkan terjadinya bencana hidrologis. Agar mencapai keberhasilan penanganan dampak bencana hidrologi di tingkat komunitas petani-perdesaan diperlukan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*), dengan Pemberdayaan melalui Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk pencegahan Kerawanan Pangan dan Peningkatan Kapasitas (*Capacity building*) Masyarakat Tani. Dua Langkah pokok untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan yaitu: pertama Pelatihan bertujuan untuk memampukan (ketrampilan) mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan melalui budidaya pangan pokok beras dengan konsep keragaman pangan pokok dan Kedua Pendampingan bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan penerapan antisipasi dan pencegahan kerawanan pangan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi para pihak (Stakeholders).



PENDAHULUAN

Kerawanan Pangan merupakan suatu bencana yang menunjukkan rangkaian proses dari peristiwa bencana hidorlogis baik karena perubahan iklim, atau tindakan manusia yang menyebabkan turunnya daya dukung (*carrying capacity*) alam, sehingga kapasitas produksi pangan menurun dan ketersediaan pangan berkurang.

Oleh karena itu penting diketahui beberapa hal berikut ini: Pertama Kerawanan pangan tidak terjadi secara mendadak. Proses tersebut diawali dengan rasa khawatir karena tidak memiliki cukup makanan, jika keadaan tidak berubah akan diikuti perubahan pola makan karena sumber makanan terbatas, dan akhirnya penurunan konsumsi makanan di rumah tangga. Kedua FAO sejak 2013 menggunakan instrumen *Food Insecurity Experienced Scale* (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Ballard et al. 2013), untuk mengukur kerawanan pangan: tidak mengalami rawan pangan, rawan pangan sedang, dan rawan pangan berat. menjadi salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Selanjutnya Ketiga kajian dari Ariani (2015) dikutip oleh Murdianto (2022) bahwa penyebab kerawanan pangan (wilayah maupun rumah tangga): (a) ketimpangan PDRB antarwilayah/provinsi, (b) ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana, (c) geografi wilayah (kepulauan), (d) besaran dan ketimpangan pendapatan rumah tangga, (e) kenaikan harga pangan dan non-pangan.

Keempat, jika indikator kerawanan pangan telah dihasilkan, maka diperlukan upaya mengatasi permasalahannya, sehingga perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat tani. Permasalahan adalah resiko kebencanaan kerawanan Pangan, sering kali timbul di Indonesia dan berbagai kebijakan telah dilahirkan. Namun demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, karena sifat bencana yang dapat diprediksi dan diupayakan untuk mengantisipasi, dimitigasi untuk mencegah terjadinya bencana, masih diperlukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia petani (komunitas desa-kecamatan) daerah rawan bencana dan penerapan kebijakan yang representatif untuk mengimplementasikan program penganejaragamab pangan baik disisi produksi maupun konsumsi, sehingga resiko bencana kerawanan pangan dapat diminimalisir.

Antisipasi bencana kerawanan pangan di Kepulauan Nusa Tenggara, perlu diwaspadai mengingat di wilayah ini puluhan tahun terakhir potensi keragaman pangan tinggi sedah beralih ke pamham pokok beras. Selain itu perlu diperhatikan bahwa permasalahan yang ikut hadir di Indonesia terkait dengan ketahanan pangan wiyalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup banyak dengan akses pangan yang cukup rendah, produksi pangan belum cukup untuk membentuk cadangan pangan yang memenuhi persyaratan ketahanan pangan yang mantap, dan konsumsi pangan pokok masih sangat terfokus terhadap beras, diversifikasi ke arah pangan lokal kurang berkembang, dan perbaikan pola konsumsi ke arah Pola Pangan Harapan berlangsung sangat lambat. (Rosita I dan Ikomatussuniah, 2022).

Menurut Rosita I dan Ikomatussuniah, (2022) upaya percepatan diversifikasi ini dapat dilakukan melalui beberapa lima cara, tiga diantara terkait dengan penyertaan komunitas lokal dan pemberdayaan, yaitu: 1. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal di suatu wilayah daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, 2. Peningkatan kemampuan dan kapasitas pada sumber daya manusia dalam pengembangan diversifikasi pangan dan 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan program diversifikasi pangan. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat tani dalam kaitan antisipasi kerawanan pangan) dijadikan sebagai judul dari makalah ini dilatarbelakangi oleh upaya mengingatkan Kembali bahwa kebencanaan khususnya bencana hidrologi dapat secara langsung menimbulkan kerawanan pangan di suatu lokasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam penanganan kebencanaan Langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, diperlukan, karena kerawanan pangan disuatu daerah tidak bahanya berpengaruh (mengancam) kepada pelaku penyedia pangan khususnya petani tetapi juga masyarakat secara umum (Murdianto,2022)

PEMBAHASAN

1. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TANI

Sosialisasi dan pemberdayaan terkait diversifikasi produksi dan konsumsi pangan lokal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan (serta keberdayaan) masyarakat lokal dan mampu mengurangi

resiko bencana kerawanan pangan. Terdapat dua Langkah pokok yaitu: pertama Pelatihan bertujuan untuk memampukan (ketrampilan) mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan melalui budidaya pangan pokok beras dengan konsep keragaman pangan pokok dan Kedua Pendampingan bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan penerapan antisipasi dan pencegahan kerawanan pangan

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat (*Community empowering*)

Terkait dengan Antisipasi Kerawanan Pangan, maka Institusi Pemerintah (aktor utama bertanggungjawab), namun demikian upaya Memampukan Masyarakat Petani dengan melakukan pemberdayaan (*community development*) dan meningkatkan keberdayaan (*capacity building and empowering*) untuk turut serta berpartisipasi mencegah kerawanan pangan.

Oleh karena itu dalam pemberdayaan masarakat ditekankan pelaksanaannya harus memegang prinsip prinsip pemberdayaan. Terdapat lima prinsip pemberdayaan yang harus dijadikan acuan kebijakan pemberdayaan masyarakat-komunitas petani (komunitas desa-kecamatan) rawan bencana seperti yang dikemukakan oleh Rubin dalam Sumaryadi (2005) mencakup 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pertama, break-even. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.

Kedua, Pelibatan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

Ketiga, Pelatihan SDM. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.

Keempat Memaksimalkan Sumberdaya. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya ‘

Kelima Adanya Fungsi Penghubung. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikrodiperlukan

Secara operasional pelaksanaan pemberdayaan pada komunitas petani (komunitas desa-kecamatan) lima prinsip pemberdayaan komunitas yang penting untuk diterapkan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Dikutip dari Maarif SD, (2021). kelima prinsip tersebut.

1. **Penyadaran.** Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menyadari bahwa mereka mempunyai tujuan dan masalah. Dalam pemberdayaan komunitas, masyarakat harus didorong menemukan peluang dan sumber daya yang dimiliki, dan manfaatnya. Dengan begitu, masyarakat akan mampu merumuskan berbagai kebutuhan dan aspirasinya.
2. **Pelatihan.** Pelatihan ialah cara untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan. Pendidikan untuk meningkatkan

ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk adalah sebagian contohnya. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat suatu komunitas membicarakan masalah-masalah mereka.

3. **Pengorganisasian.** Komunitas harus dapat mengorganisasi individu-individu anggotanya agar mereka bisa menjadi lebih kuat dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Dengan organisasi yang kokoh, komunitas bisa mengerjakan segala hal dengan cara yang teratur. Pengorganisasian yang baik akan mendorong pembagian tugas di kalangan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing, serta tumbuh kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tetapi kepemimpinan di berbagai tingkatan.
4. **Pengembangan kekuatan.** Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Perlu adanya penyadaran kepada komunitas agar mereka merasa berdaya dan berkekuatan untuk berlatih dan berorganisasi.
5. **Membangun Dinamika.** Membangun dinamika berarti mendorong masyarakat atau komunitas agar bisa memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai rencana yang digariskan serta diputuskan sendiri. (Maarif SD, (2021).

Pemberdayaan (*empowerment*), digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan

keterbelakangan (merupakan alternatif pendekatan pembangunan (*People centered Development*)). Sedangkan pemberdayaan yang menekankan pada proses, bermakna pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Dengan demikian rumusan singkat Pemberdayaan (*Empowering*) ditujukan untuk memandirikan dan memampukan masyarakat, terkait dengan peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

2.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Mengapa pendekatan pengembangan masyarakat terkait upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam arti lebih luas masyarakat pedesaan-kecamatan, karena keberhasilan mengantisipasi bencana kerawanan pangan akan lebih berpeluang berhasil manakala pihak yang paling terpengaruh belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggulangi dan mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) terhadap gangguan akibat kebencanaan tersebut. Sehingga pendekatan pemberdayaan diupayakan agar:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-

langkah lebih konkret, selain menciptakan “atmosfer” bagi bekerjanya pemberdayaan, juga menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

3. Makna melindungi, yakni melindungi masyarakat yang lemah (kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sedangkan Menurut Sumodiningrat, G (1996) menilai bahwa untuk suatu program pemberdayaan agar efektif dan memperoleh hasil yang memadai, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu

mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Dalam rangka pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*), memerlukan kebersamaan dan tafsir bersama akan nasib bersama warga desa (*common sense*), yang memperhatikan kebersamaan dalam keragaman (pluralitas) dan kekhasan lokal, kearifan lokal, untuk bersama-sama menggalang kekuatan dan meningkatkan kemandirian (Kuswandoro WE, 2016).

Kartasmita G (1995) dalam Kuswandoro WE, (2016) mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : Pertama, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). dalam rangka ini

diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya dan Ketiga Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Kartasmita G (1995) dalam Kuswandoro WE (2016) menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses individual dan sosial, yakni suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuh-kembangan kreativitas. Ketiganya memerlukan kebersamaan yang memperkenankan warga desa untuk mengembangkan perasaan bersama yang menjadi tanggung jawab mereka secara mandiri atas dasar kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Kartasmita G (1995), mengajuan beberapa pendekatan dalam pemberdayaan ini yaitu, *pertama*, pemberdayaan itu harus terarah (*targetted*), yakni langsung kepada

yang memerlukan. *Kedua*, langsung megikutsertakan dan dilakukan oleh masyarakat. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok.

2.3 Pemberdayaan melalui Penganekaragaman Konsumsi Pangan muntuk pencegahan Kerawanan Pangan

Dasar pijakan kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal : Pertama Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Meskipun landasan hukum tersebut untuk mengupayakan diversifikasi pangan terkait keamanan pangan dan mencegah terjadinya tawan pangan, namun “catatan sejarah” kebijakan dan program penganekaragaman (diversifikasi) pangan lokal dan nasional, menunjukkan kurang berhasil, Hasil studi kementerian lingkungan hidup seperti yang disitir oleh pusat keseterediaan dan kerawanan pangan, badan ketahanan pangan tahun 2012 yang dikutip oleh Rosita I dan Ikomatussuniah (2022). bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki 100 spesies biji-bijian, sugu penghasil tepung, umbi-umbian dan gula sebagai sumber karbohidrat. Sayangnya, hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat yang dikenal luas dan dimanfaatkan unntuk dikonsumsi secara berkelanjutan oleh masyarakat seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, sugu dan lainnya. Namun karena intensitas konsumsi komoditas

pangan non beras ini rendah, maka ada beberapa yang beralih kepada beras dan gandum saja. Padahal pangan yang beragam tersebut seperti jagung, sugu, dan umbiumbian memiliki prospek yang cukup tinggi untuk dikembangkan dan diolah sebagai salah satu substitusi beras dan untuk diolah menjadi berbagai makanan yang memiliki nilai tinggi. Namun kegiatan tersebut membutuhkan dukungan pengembangan teknologi, proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang tepat untuk mengubah stigma masyarakat terhadap pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior. Usaha peningkatan mutu ini bisa melalui agroindustri, selain meningkatkan pendapatan juga berperan sebagai penyediaan pangan yang beragam dan memiliki nilai jual tinggi.

Rosita I dan Ikomatussuniah (2022) menyatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terhentinya upaya diversifikasi konsumsi pangan. Faktor tersebut diantaranya adalah : 1. Komoditas padi-padian memang lebih enak dan mudah diolah oleh masyarakat, 2. Ada beberapa konsep pangan yang telah keliru seperti dalam stigma masyarakat yang menyatakan, “belum dikatakan makan kalau belum makan nasi”, 3. Beberapa kebijakan pangan yang tumpang tindih, 4. Pendapatan rumah tangga yang memiliki standar kecil, 5. Harganya yang murah dan ketersediaan beras yang melimpahruah, 6. Beras sebagai komoditas pangan superior dibandingkan dengan komoditas non beras lainnya, 7. Terbatasnya teknologi dalam pengolahan dan promosi komoditas pangan non beras, 8. Adanya kebijakan impor gandum, dan adanya jenis *product development* yang gencar melakukan promosi.

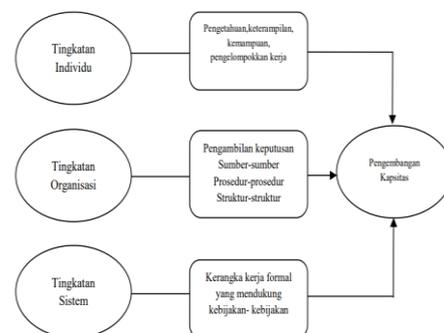
Di tingkat komunitas petani, hal yang berkaitan dengan faktor sosial budayal-budaya dan ekonomi tampaknya harus segera dibenahi sehingga upaya merealisasikan program diversifikasi pangan bisa dilakukan. Mereduksi stigma masyarakat yang menyatakan, “belum dikatakan makan kalau belum makan nasi”, serta mereposisi beras tidak lagi sebagai makanan unggulan dan simbol kemakmuran, merupakan Langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pangan pokok beras dan mengurangi resiko bencana kerawanan pangan terutama di wilayah yang keragaman sumber bahan pangannya tinggi seperti di wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Upaya percepatan diversifikasi di wilayah tersebut ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti yang dikemukakan Rosita I dan Ikomatussuniah (2022), antara lain: 1. Internalisasi, sosialisasi, promosi, dan publikasi rencana aksi, 2. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal di suatu wilayah daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, 3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas pada sumber daya manusia dalam pengembangan diversifikasi pangan, 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan program diversifikasi pangan. 5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan dalam rangka pemanfaatan ketahanan pangan.

2.4. Peningkatan Kapasitas (Capacity building) Masyarakat Tani

Secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan

melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Menurut Hardjanto (2006) dalam Jenivia Dwi Ratnasari D, et al.(tt) menyebutkan *The ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission* (Tujuan akhir dari *capacity building* adalah untuk memungkinkan organisasi tumbuh lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misinya). Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah: 1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. 3. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya. 4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.



Gambar 1 : Tingkat *Capacity Building*

Sumber: Soeprapto H. R. R, 2006

Pengembangan kapasitas *capacity building* (Gambar 1). Menurut Soeprapto H. R. R, 2006. harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan: 1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; 2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubunganhubungan dan jaringan-jaringan organisasi; 3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

2.5. Implikasi *Capacity Building* pada Masyarakat Tani

Peningkatan kapasitas masyarakat tani (secara umum masyarakat atau komunitas desa-kecamatan) menjadi keniscayaan mengingat bencana kerawanan pangan merkalah yang paling berdampak, sementara pemahaman terhadap lebcanaan dan ketrampilan untuk mengantisipasi terjadinya bencana sangat terbatas. Oleh karena itu Implikasi dari konsepsi *Capacity Building* ini terkait kerawanan pangan adalah: pertama, penciptaan ruang bagi bekerjanya peran-peran lokal masyarakat Petani, mengatasi permasalahan kerawanan pangan, kedua,

peran aktor-aktor (petani) lokal dalam menafsir "nasib sendiri" dan "nasib bersama" untuk memapukan diri dalam Ketahanan pangan lokal, dan ketiga, "kewenangan komunitas" yakni kepada petani atau "petani selaku komunitas petani yang satu" untuk menentukan ketahanan pangan.

Kegiatan Pemberdayaan merupakan kegiatan yang menyatu (embedded) dengan kegiatan pembangunan pertanian (secara umum) dan mengatasi kerawanan pangan (secara khusus), dan merujuk pada satu tujuan atau misi bersama yakni kemampuan dan kemandirian pangan (pada akhirnya).

3. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DESA-KECAMATAN/PETANI DAN PELIBATAN STAKEHOLDER

3.1. Peran serta Para Pihak dalam Berkolaborasi mengantisipasi Kerawanan Pangan

Menurut Widhi K A, (2022) dalam Murdianto (2022), terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan penggunaan konsep pendekatan pentahelix penting dalam mitigasi bencana diantaranya adalah : Pertama, kegiatan tanggap dan kesiapsiagaan yang efektif dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi cedera, membatasi kerusakan harta benda, dan meminimalkan segala macam ancaman akibat adanya bencana. Kedua, mitigasi dan kesiapsiagaan di masyarakat membantu melindungi nilai-nilai masyarakat dan mengurangi kondisi yang tidak diinginkan selama bencana. Ketiga, mitigasi dan kesiapsiagaan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar organisasi dan menetapkan tanggung jawab kepada aktor-aktor kunci.

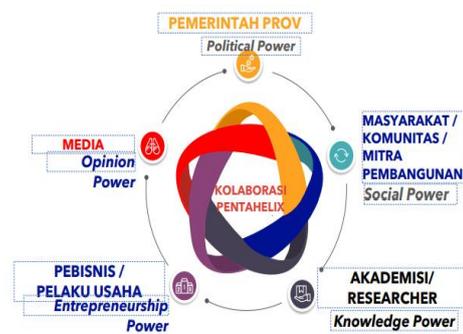
Seperti pemangku kepentingan, masyarakat, pejabat negara, pejabat lokal, serta rumah sakit. Keempat mitigasi dan kesiap-siagaan ini membantu mengidentifikasi sumber daya (personil, waktu, keuangan, peralatan, perlengkapan atau fasilitas penunjang) yang mungkin dibutuhkan masyarakat untuk tindakan tanggap dan pemulihan dan kesiap-siagaan.

Meurut Kusumasari B (2014) dalam Widhi K A (2022) kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan yang kuat menjadi permasalahan awal dalam mengatasi kebencanaan. Terdapat banyak Tahapan yang harus dilakukan untuk dapat membangun kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan yang kuat. Tahapan tersebut antara lain menetapkan manajemen darurat, menilai bencana, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat. Selain itu, nilai dan pentingnya kesiapsiagaan dan proses terkadang sulit untuk diukur.

Pada saat yang sama, masyarakat (yang dimaksud adalah pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana) sering membuat rencana darurat yang rumit, namun gagal mengembangkan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan tertulis. Terlebih lagi rencana tersebut tidak pernah disebarluaskan/disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi pentahelix merupakan pendekatan strategis untuk dikembangkan dalam penanggulangan bencana dan khususnya bagi para pemangku kepentingan yang berkomitmen dan peduli terhadap upaya pengurangan risiko bencana.

Peran Masing-Masing Komponen dalam Pendekatan Pentahelix. Dalam pendekatan pentahelix pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu akademisi, industri/bisnis, administrasi publik/LSM, penduduk lokal, dan media (seperti penulis cantumkan Gambar 2, dimana administrasi umum ditulis sebagai Pemerintah). Kelima komponen tersebut dinaungi atau yang bertanggung jawab adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Peran para *stakeholders* dalam penanggulangan bencana kerawanan pangan antara *stakeholders* dalam pendekatan pentahelix maka dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2: Peran serta Para Pihak dalam Kolaborasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Kerawanan Pangan.

Media, berperan aktif dalam membagikan informasi terkait perkembangan, penanganan bencana (termasuk mitigasi dan kesiapsiagaan) serta dampak terkait bencana kerawanan pangan

Akademisi, melakukan inovasi terkait pencegahan bencana kerawanan pangan serta melakukan pendampingan dan penelitian bencana kerawanan pangan agar bencana tidak menimbulkan dampak negatif yang semakin luas.

Industri/bisnis, menerapkan ajuran dari akademisi agar penyebaran bencana kerawanan pangan tidak semakin berat dan meluas.

Pemerintah (Pusat sampai Kabupaten/Kota), menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan bencana dan memimpin - mengkoordinasikan serta kontrol terhadap manajemen penanggulangan bencana untuk mengentaskan bencana kerawanan pangan

SIMPULAN

Pemberdayaan komunitas desa-kecamatan/petani dalam mengantisipasi bencana kerawanan pangan sangat diperlukan, dalam hal ini pemberdayaan dengan peningkatan kapasitas agar mereka mampu secara personal naupun kelembagaan yang memungkinkan mereka berdaya mengelola kebencanaan,

Keberdayaan masyarakat tani juga akan tercermin dari kemampuan merubah stigma dan budaya: bahwa produk pangan non beras sumber kalor mampu menggantikan posisi beras sebagai pangan pokok dan beras bukan lagi diposisikan sebagai lambing kemakmuran. Sehingga program diversifikasi pangan baik produksi maupun konsumsi terutama di wilayah yang tinggi resiko bencana kerawanan pangan

Peranserta berbagai *stakeholder* untuk berkolaborasi mdegan pendekatan penta helix,

memungkinkan terkordinasinya upaya engatasi bencana kerawanan pangan. Tentu implementasi peran masing masing staje holders menjadi dasar pengorganisasian manajemen bencana, sehingga kordinasi dan kolaborasi para pihak mampu menyelesaikan bencana kerawanan pangan.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bencana Hidrologis, yang berdampak pada kerawanan pangan, tidak hanya akibat dari perubahan iklim tetapi juga disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*) alam. Oleh karena itu penanganan bencana hidrologis, merupakan masalah Bersama yang harus diatasi secara Bersama (antar stakeholders). Sehingga diperlukan kolaborasi stakeholder untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model penanganan masalah yang menyertakan sejumlah pihak, penta helix, dimaksudkan agar mampu mengatasi masalah kerawanan pangan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat

Rujukan

BADAN KETAHANAN PANGAN. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Jakarta

Hardjanto, I (2006) Pembangunan Kapasitas Lokal (*Local Capacity Building*). Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dalam Jenivia Dwi Ratnasari,

- Mochamad Makmur, Heru Ribawanto. tt). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, <https://media.neliti.com/media/publications/73883-ID-pengembangan-kapasitas-capacity-building.pdf>
- Ife J (1996). *Community development : creating community alternaves - vison, analysis and practice*
- Kartasamita G, 1995. Pembersayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengemnbangan Ekonomi Rakyat <https://www.neliti.com/publications/242965/pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-pengembangan-ekonomi-rakyat>
- Kuswandro WE, 2016. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi. <https://wkuswandro.wordpress.com/2016/01/31/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desaberbasis-partisipasi/>
- Maarif SD, (2021). "Apa Saja Prinsip-prinsip Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat?", tirta.id - 6 Apr 2021. <https://tirta.id/apa-saja-prinsip-prinsip-pemberdayaan-komunitas-dan-masyarakat-gbKj>
- Murdianto,2022. Pemberdayaan Masyarakat Dan Petani Dalam Kaitan Antisipasi Kerawanan Pangan. Disampaikan pada Webinar Propaktani, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI. Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI dengan PISPI, dan Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, dengan Tema: "Antisipasi Kerawanan Pangan di Pulau Kalimantan", Webinar; 06 September 2022
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang *Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2010/bn383-2010.pdf>
- Rosita I dan Ikomatussuniah, 2022. Upaya Penerapan Diversifikasi Pangan Terhadap Mewujudkan Indonesia Tanpa Impor Beras.
- Soeprpto H. R. R, 2006. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance (The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance)*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48006389/PENGEMBANGAN_KAPASITAS_PEMERINTAH_DAERAH
- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial Jakarta: Gramedia.

